

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya *agenda setting*, *formulation*, *adoption*, dan tahapan sesudahnya *assesement*. Implementasi adalah tahapan dalam suatu proses kebijakan publik, pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Tahap implementasi ini secara khusus menjadi salah satu strategi dalam menjalankan suatu kebijakan dari organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dari proses sebelumnya (Kusumanegara Solahuddin, 2010 dalam Sutikno, C 2022). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses dalam menentukan kebijakan publik. Implementasi kebijakan mencakup tindakan publik atau individu yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan mekanisme pembuatan sistem kebijakan yang dirancang secara spesifik sesuai program yang akan di realisasikan (Rahmat, 2015 dalam Sutikno, C 2020). Oleh sebab itu, implementasi kebijakan publik adalah aspek penting atas keseluruhan proses kebijakan yang dapat menggambarkan adanya keterkaitan perumusan dan implementasi kebijakan. Tindakan dalam proses implementasi harus di koordinasikan dengan tujuan dan tugas yang ditetapkan dalam proses perancangan strategi yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan sumber daya (Markiewicz, 2011 dalam Sutikno, C 2020).

Pendidikan menjadi salah satu isu dalam kebijakan publik, yang mana pemerintah dapat membuat produk kebijakan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu masalah atau isu publik yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pendidikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara Indonesia dalam

memperoleh kecerdasan, dimana kebijakan ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berisi "setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan" dan dilanjutkan dalam ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan mengadakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan bertakwa sekaligus berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perundang-undangan. (Desi, 2023).

Dalam memperoleh mutu pendidikan yang layak, pemerintah mengeluarkan peraturan RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, peraturan ini berisikan usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu perencanaan dari kesempatan belajar yang dimaksud supaya mengajak peserta didik kepada perubahan yang didambakan dan mengevaluasi hingga sampai mana perubahan tersebut sudah terjadi pada diri peserta didik. Pengembangan kurikulum akan selalu terjadi dalam pendidikan Indonesia. Di Indonesia pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2022 (Kurikulum Merdeka)" (Ulinniam et al., 2021) (dalam Rahayu et al., 2022).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Akses mudah terhadap informasi, interaksi melalui media sosial, serta kemajuan teknologi komunikasi telah membentuk cara pandang dan perilaku individu di era modern. Namun, seiring dengan dampak positif yang ditawarkan oleh dunia digital, muncul pula tantangan dalam membangun karakter yang kuat dan beretika di kalangan generasi muda Putri Yulianti (2024) dalam Muhtar Hidayat (2024). Menurut Munir (2008) dalam Agung Prihatmojo (2020) sisi positif dari adanya perkembangan teknologi tersebut pun menjadikan mobilitas yang dilakukan oleh manusia lebih mudah dan lebih canggih dalam segala hal. Dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah degradasi moral.

Degradasi moral sering terjadi di lingkungan sekolah dasar. Guru sekolah dasar sering menjumpai siswa yang berbohong, tawuran, melakukan tindakan bullying, mencuri, pemerkosaan, pembunuhan, sikap tidak sopan santun terhadap guru dan kakak kelas dalam berbicara, dan eksistensi berlebihan di media sosial selayaknya orang dewasa. Degradasi moral siswa di sekolah dasar paling mengkhawatirkan yaitu 68 persen siswa sekolah dasar sudah aktif mengakses konten porno Zubaidah (2013) dalam Agung Prihatmojo (2020).

Tabel 1. 1 Data Jumlah Kasus Kekerasan dari tahun 2021-2024

NO	Bentuk Kekerasan	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Seksual	10.327	11.682	13.156	14.459	49.624
2.	Psikis	7.901	9.018	9.050	9.800	35.769
3.	Fisik	9.603	9.541	10.500	11.372	41.016
4.	Penelantaran	2.514	2.880	2.763	2.588	10.745
5.	Eksplorasi	338	290	368	386	1.382
6.	Trafficking	683	476	458	471	2.088

Sumber: Data diolah oleh penulis (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam SIMFONI PPA)

Dari data diatas merupakan jumlah kasus kekerasan dari tahun 2021-2024. Jumlah kasus kekerasan tertinggi yaitu kekerasan seksual dengan jumlah 49.624 kasus dan jumlah kasus kekerasan terendah yaitu kekerasan eksploitasi dengan jumlah 1.362 kasus. Dari adanya berbagai bentuk kekerasan, degradasi moral juga terjadi pada Tingkat Pendidikan yang diantaranya meliputi Tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK, dan PAUD:

Tabel 1.2 Data Korban Kekerasan Bidang Pendidikan pada tahun 2021-2024

NO	Pendidikan	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	2.015	2.431	2.477	2.761	9.684
2.	SMA	7.955	8.511	9.612	10.033	27.111
3.	SMP	5.945	6.574	7.597	8.396	28.512
4.	SD	4.883	5.828	6.915	7.178	24.084
5.	TK	410	296	0	0	706
6.	PAUD	150	96	0	0	246

7.	TK/PAUD	0	177	725	820	1.722
8.	Tidak/belum pernah sekolah	1.675	1.988	2.253	2.439	8.355
9.	Tidak diketahui	4.096	3.782	2.914	2.925	13.717

Sumber: Data diolah oleh penulis (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam SIMFONI PPA)

Data diatas merupakan korban kekerasan pada bidang Pendidikan pada tahun 2021-2024. Berdasarkan tabel, korban kekerasan dalam bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sebagai peringkat ketiga setelah Tingkat SMA dan SMP dengan total jumlah 24.084 korban. Sedangkan tingkat PAUD sebagai korban kekerasan paling sedikit dengan jumlah 246 korban.

Degradasi moral di Indonesia menjadi fenomena umum (Sudiarta & Porro, 2023). Penyimpangan sosial mulai dari hal kecil seperti memakai pakaian yang tidak pantas sebagai pelajar, datang terlambat, minuman keras, mencuri, bullying, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran, kekerasan, hingga hal yang besar seperti terjadinya kasus-kasus pembunuhan di dunia pendidikan Indonesia saat ini dapat dengan mudah dilihat melalui berbagai media. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa pada pendidikan di Indonesia sekarang ini tengah terjadi degradasi moral (Revelina et al, 2023).

Sebagai respon perkembangan zaman dan juga adanya ragam degradasi moral di atas maka kini pemerintah mengkonsep dan mulai melaksanakan kurikulum baru yang disebut kurikulum merdeka. Kurikulum secara sempit dapat dimaknai sebagai serangkaian rencana dalam suatu sekolah yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, model pembelajaran, strategi hingga metode pembelajarannya. Di Indonesia telah silih berganti perubahan kurikulum, saat ini menerapkan kurikulum merdeka sebagai ganti kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Pada awalnya kurikulum ini diuji cobakan pada 2.500 sekolah penggerak hingga terus berkembang ke ribuan sekolah lainnya (Kemendikbud, 2022). Terdapat beberapa poin utama perubahan dari kurikulum 2013 di antaranya yaitu adanya perubahan skema indikator menjadi

capaian pembelajaran (CP), RPP menjadi modul ajar. Dalam penilaian terdapat istilah baru yaitu formatif dan sumatif (Zakso, 2023). Selain itu dalam kurikulum ini juga terdapat skema Fase dari fase A hingga F. Setiap fase menunjukkan cakupan kelas berdasarkan capaian pembelajarannya. Fase tersebut berlangsung dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMA/SMK sederajat.

Kurikulum Merdeka sejatinya juga sebagai bentuk respon akan tantangan global dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Perubahan tersebut menuntut terwujudnya peserta didik yang tangguh dan unggul. Ketangguhan tersebut tidak sekadar dilihat dari kemampuan pengetahuannya tetapi aspek karakter pula. Untuk itu dalam kurikulum merdeka ini memuat program penguatan karakter melalui pembentukan Profil Pelajar Pancasila dengan tujuan membentuk karakter peserta didik yang unggul dengan bermuara pada landasan dasar negara Pancasila. Untuk penyempurnaan pendidikan karakter Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai salah satu Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Adapun yang melatar belakangi munculnya Profil Pelajar Pancasila adalah kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi atas adanya degradasi moral pada generasi muda di Indonesia. Tujuan utama dari Kurikulum ini adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila (Kemendikbud 2024). Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak awal pemerintah membuat kurikulum baru. Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN 2 Sokaraja Tengah masih terdapat permasalahan dalam proses pengimplementasian P5. Berikut adalah data bimbingan dan konseling karakter siswa kelas V di SDN 2 Sokaraja Tengah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Bimbingan dan Konseling Karakter Siswa Kelas V SDN 2 Sokaraja Tengah 2023

No	Permasalahan	Bentuk Bimbingan	Jenis Bimbingan	Kelas
1.	Mengambil uang	Individu	Individu	V
2.	Berkelahi	Individu	Individu	V
3.	Membully	Individu	Individu	V
4.	Berkata kasar	Individu	Individu	V
5.	Merusak fasilitas	Individu	Individu	V

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik di SDN 2 Sokaraja Tengah, permasalahan tersebut diantaranya: Mengambil uang, berkelahi, membully, berkata kasar, merusak fasilitas. Penerapan P5 yang dilakukan di SDN 2 Sokaraja Tengah memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan degradasi moral. Dengan fokus pada pembentukan karakter holistik, pembelajaran kontekstual, dan penguatan nilai-nilai Pancasila, P5 dapat menjadi alat yang efektif untuk menanamkan fondasi moral yang kuat pada siswa. Namun keberhasilan implementasi P5 dalam konteks ini sangat bergantung pada desain proyek yang tepat, pemahaman guru yang mendalam, keterlibatan aktif siswa dan orang tua, serta evaluasi yang komperhensif. Dengan mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi P5, diharapkan siswa-siswa yang sudah menerapkan P5 dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik.

Pada pasal 16 ayat 5-7 dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan Pendidikan dan Peserta Didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dikembangkan oleh Satuan Pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum.

Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka di SDN 2 Sokaraja Tengah dilaksanakan sejak tahun 2022 yaitu sejak awal adanya kebijakan tersebut. Berikut adalah data nama Sekolah Dasar pelaksana Kurikulum Merdeka:

Tabel 1.4 Data Nama Sekolah Dasar Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kecamatan Sokaraja

No	Nama Satuan Pendidikan	Kelurahan/Desa	Status
1	SDN 1 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
2	SDN 2 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
3	SDN Banjarsari Kidul	Banjarsari Kidul	Negeri
4	SD AI- Falah Banjarsari Kidul Sokaraja	Banjarsari Kidul	Swasta
5	SDN Jompo Kulon	Jompo Kulon	Negeri
6	SDN Kalikidang	Kalikidang	Negeri
7	SDN 1 Karangduren	Karangduren	Negeri
8	SDN 2 Karangduren	Karangduren	Negeri
9	SDN 1 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
10	SDN 2 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
11	SDN 3 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
12	SDN 1 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
13	SDN 2 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
14	SDN Karangrau	Karangrau	Negeri
15	SDN Kedondong	Kedondong	Negeri
16	SDN 2 Klahang	Klahang	Negeri
17	SDN 1 Klahang	Klahang	Negeri
18	SDN Lemberang	Lemberang	Negeri
19	SDN 2 Pamijen	Pamijen	Negeri
20	SDN 1 Pamijen	Pamijen	Negeri
21	SDN Sokaraja Kidul	Sokaraja Kidul	Negeri
22	SD Kristen Sokaraja	Sokaraja Kidul	Swasta
23	SDN 3 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
24	SDN 4 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
25	SDN 2 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
26	SDN 1 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
27	SD IT Annida Sokaraja	Sokaraja Kulon	Swasta
28	SDN Sokaraja Lor	Sokaraja Lor	Negeri
29	SDN 2 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
30	SDN 1 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
31	SD IT Top Kids	Sokaraja Tengah	Swasta
32	SD NU Master Sokaraja	Sokaraja Tengah	Swasta
33	SDN 2 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
34	SDN 1 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
35	SDN Wiradadi	Wiradadi	Negeri

36	SD IT Mutiara Ilmu	Wiradadi	Swasta
----	--------------------	----------	--------

Sumber : Kurikulum.kemdikbud.go.id

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Dasar yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di Kecamatan Sokaraja sebanyak 36 Sekolah Dasar. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah adalah salah satu sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka belajar, diketahui bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar dimulai pada tahun pelajaran 2021. Kurikulum merdeka belajar pada tahun 2023 di SDN 2 Sokaraja Tengah dilaksanakan secara bertahap dengan pengimplementasian pada kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5.

Pada tahun 2023 SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi sekolah rujukan dalam pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang diikuti oleh peneliti selama empat bulan mulai dari tanggal 14 Agustus – 14 Desember 2023. Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan adalah salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan mengajar di sekolah. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Salah satu komponen integral dari Kurikulum Merdeka adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dirancang untuk mengembangkan kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh peserta didik, meliputi: keimanan, keberagaman global, semangat gotong royong, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, merupakan ciri khas penerapan kurikulum merdeka yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Keberhasilan penerapan P5 sangat bergantung pada kesiapan guru, guru memiliki peran penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan P5. Kesiapan guru meliputi persiapan perangkat pembelajaran, penguasaan materi, serta kemampuan mengelola pembelajaran berbasis proyek. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk berinovasi dan menciptakan suasana belajar yang mendukung keterlibatan aktif siswa, sehingga mereka dapat menginternalisasinilai-nilai

Pancasila dengan baik. Sayangnya, banyak guru, terutam di Tingkat Sekolah Dasar, masih menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan P5. (Maudyna, et al., 2023 dalam Rahayu, L et.al 2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kendala dan tantangan terbesar dalam Kurikulum Merdeka yang dihadapi oleh pengajar sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan perangkat pembelajaran untuk Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai, serta keterbatasan modul dan panduan yang jelas. Kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas memahami materi, tetapi juga menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan melakukan evaluasi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan intensif maupun pendampingan, agar para guru dapat melaksanakan kurikulum ini dengan optimal.

Tujuan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah untuk mendidik siswa agar lebih kompeten, berakarakter, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Pramesti et al., 2024). Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah mengambil tema mengenai “Kearifan Lokal”. Di era digitalisasi ini, integrasi pendidikan berbasis kearifan lokal ke dalam pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif. Kearifan lokal dalam pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan potensi lokal sebagai keunggulan daerah. Dengan memasukkan elemen-elemen budaya setempat ke dalam kurikulum, diharapkan peserta didik dapat mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal di lingkungannya Tilaar 2017 (dalam Randi 2024). Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah mengambil tema yaitu “kearifan lokal”, harapannya siswa-siswi karakternya dapat terbentuk dengan adanya pemilihan tema tersebut. Dimana siswa-siswi dapat belajar mandiri mengenal keaneka ragaman budaya di Indonesia. Tentunya siswa-siswi di tuntut untuk saling bekarja sama, jujur, saling support, saling menghargai, tanggung jawab serta rasa cinta pada tanah air dalam proses pengimplementasian P5 di sekolah. Dengan adanya proses pengembangan karakter siswa tentunya diharapkan untuk bisa mencegah adanya degradasi moral menyeluruh terhadap peserta didik di SDN 2 Sokaraja Tengah.

Salah satu pengimplementasian kurikulum merdeka belajar di SDN 2 Sokaraja Tengah adalah dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan pembiasaan dan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Dengan adanya hal ini karakter siswa diharapkan terbentuk yaitu menghargai kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar, toleransi yang tinggi, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu hal. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini masih dalam proses perkembangan, sehingga Pendidikan berusaha mengarahkan murid untuk berfokus kepada prosesnya bukan hasil yang didapat, serta rasa cinta pada tanah air dalam proses pengimplementasian P5 di sekolah. Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya penerapan profil pelajar pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah:

Tabel 1.5 Kegiatan dalam Upaya penerapan profil pelajar Pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Literasi asmaul husna	Semua siswa
2.	Do'a Bersama sebelum pembelajaran	Semua siswa
3.	Pojok baca	Kelas 1, 2, 4, dan kelas 5
4.	Upacara hari senin	Guru dan siswa
5.	Jum'at sehat	Guru dan siswa
6.	Penerapan budaya 5S	Guru dan siswa
7.	Outing Class	Kelas 5

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari adanya kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat saling menghargai, supaya dapat menanamkan nilai karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya program dilaksanakan melalui pembelajaran yang berbasis pembuatan proyek, diantaranya:

Tabel 1.6 Kegiatan pembelajaran berbasis proyek di SDN 2 Sokaraja Tengah

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Tari berkelompok	Kelas 5 dan kelas 2
2.	Musik ansambel berkelompok	Kelas 4
3.	Kelompok bernyanyi	Kelas 1
4.	Pembuatan kerajinan	Kelas 1, 2, 4, dan kelas 5

5.	Pengenalan dan membuat makanan tradisional	Kelas 5
----	--	---------

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dengan adanya proses pembelajaran berbasis proyek peserta didik berlatih menjadi lebih mandiri, berlatih bagaimana saling bekerja sama, menghargai, tanggung jawab serta rasa cinta pada tanah air akan keanekaragaman budaya yang ada seperti mengetahui berbagai jenis lagu daerah dan berbagai jenis tarian dari berbagai daerah.

Pengimplementasian Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah melalui tiga tahapan penting yaitu, perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Sekolah Dasar Negeri 2 Sokaraja Tengah masih terdapat kendala pada SDM dan sarana dan prasarananya. Dari adanya kendala tersebut muncul permasalahan yaitu, kurangnya pemahaman guru terhadap pelaksanaan P5, beberapa guru belum memahami dengan baik konsep P5 mengakibatkan adanya perbedaan pendapat antar guru, cara menyusun modul ajar kurang matang, mengakibatkan implementasi program yang kurang konsisten dan tidak terarah serta pada tahapan pelaksanaan P5. Selain itu terdapat kendala dari segi sarana dan prasarana seperti media pembelajaran yang kurang memadai dan perlengkapan pendukung kegiatan Gebyar P5 kurang lengkap. Dengan adanya kondisi seperti ini maka guru dan siswa memiliki keterbatasan baik dalam tahap pembelajaran P5 maupun gebyar P5.

Berdasarkan deskripsi masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA”**. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah.